

RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka integrasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Program dan kegiatan di dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru. Lokasi kegiatan merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program dan indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. Kelompok sasaran memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan.

Sebagai salah satu bentuk perencanaan yang disusun secara berkala, maka proses penyusunan Rencana Aksi diperlukan untuk dapat melakukan breakdown terhadap rencana pencapaian target dan kinerja yang telah disusun di dalam Renja. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk dapat memfokuskan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditentukan melalui PPAS sehingga diharapkan kinerja yang menjadi target secara terukur dapat dievaluasi pencapaiannya melalui langkah monitoring dan evaluasi secara berkala.

B. TUJUAN

Sebagaimana telah dirumuskan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka Tujuan Pembangunan yang menjadi focus DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dalam rangka mencapai “ Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industry di berbagai sector yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan “sebagi turunan dari Misi Pertama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026.

C. SASARAN DAERAH

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Guna mencapai tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industry di berbagai sector yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan, maka sasaran pembanguann yang harus dicapai adalah “*Tercptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi*”.

D. INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA

Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai urusan yang diemban tiap-tiap Perangkat Daerah, maka berdasarkan tiap sasaran strategis jangka menengah, telah ditetapkan Terget Indikator Kinerja tahun 2021 pada Sasaran Pembangunan di atas sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Peresentasi Peningkatan Investasi Daerah

No	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	A	90,65
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	123 M	1,1 Trilyun

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk dapat merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2021, maka terdapat 6 (Enam) Program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Intensif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik